BARANG MILIK DAERAH

PERBUP. BOGOR NO. 16, BD 2023/NO. 16, 6 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG BARANG MILIK DAERAH YANG BERSIFAT KHUSUS ATAU BARANG SPESIFIK

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) dan Pasal 332 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah yang bersifat khusus atau barang spesifik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Barang Milik Daerah yang Bersifat Khusus atau Barang Spesifik.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 84 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 20 Tahun 2022; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 108 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 47 Tahun 2021; PERDAKAB BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2020; PERDAKAB BOGOR No. 1 Tahun 2018; PERDAKAB BOGOR No. 5 Tahun 2022; PERBUP BOGOR No. 69 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERBUP BOGOR No. 96 Tahun 2020.
 - Barang Milik Daerah Bersifat Khusus atau barang Spesifik, yang selanjutnya disebut BMD Khusus adalah barang milik daerah yang memiliki spesifikasi dan karakteristik khusus dan berbeda dengan BMD secara umum. BMD Khusus memiliki karakteristik: a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus, seperti bandar udara, pelabuhan laut, stasiun kereta api, terminal angkutan umum, kilang, instalasi tenaga listrik, dan bendungan/waduk; c. barang yang dikerjasamakan dalam rangka investasi Daerah yang berdasarkan perjanjian antar daerah, berupa tanah dan/atau bangunan; d. barang lain yang ditetapkan oleh Bupati; dan e. barang yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada: 1. Bupati; 2. Wakil Bupati; 3. mantan Bupati; 4. mantan Wakil Bupati; 5. pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 6. mantan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan 7. pegawai ASN. Selain memiliki karakteristik, BMD Khusus dapat berupa barang yang pengadaan dan /atau penyediaannya hanya dapat dilakukan oleh pihak tertentu.
- CATATAN : - Seluruh kegiatan pelaksanaan pemanfaatan BMD Khusus yang dilaksanakan dan prosesnya dilaksanakan sebelum ditetapkannya Perbup ini, dinyatakan tetap berlaku.

Seluruh kegiatan pelaksanaan penjualan BMD Khusus berupa kendaraan perorangan dinas yang dilaksanakan dan prosesnya dilaksanakan sebelum ditetapkannya Perbup ini dinyatakan tetap berlaku.

- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 April 2023 dan ditetapkan tanggal 3 April 2023.